

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik Laut China Selatan (LCS) merupakan salah satu konflik dari banyaknya konflik yang ada yang mengalami dinamika serius dan belum ada solusi hingga saat ini. China dan beberapa negara di Asia Tenggara menganggap konflik ini menjadi persoalan yang serius karena negara-negara yang bersengketa dalam konflik ini saling mengklaim wilayah laut ini. Berdasarkan data dari *US Energy Information Administration* (EIA), China memperkirakan bahwa terdapat kurang lebih ada sebesar 213 miliar barel dan gas alam hingga 900 triliun kubik di wilayah Laut China Selatan ini. (Ramkumar *et al.*, 2020, p. 3)

Salah satu negara yang berkonflik dan memperebutkan wilayahnya adalah Filipina. Konflik yang terjadi merupakan kontestasi antara China dengan beberapa negara lainnya, tidak terkecuali Filipina yakni atas *control* akan wilayah kelautan yang strategis. China dalam beberapa periode belakangan ini mempertegas *control* atas wilayah maritim. Wilayah tersebut sangat strategis karena sangat kaya akan sumber daya alam dan juga merupakan jalur pelayaran utama yang strategis.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Filipina atas konflik Laut China Selatan yang sebelumnya bersifat konfrontatif berubah menjadi kooperatif dengan China ketika berada di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte. Sebagai penguat argumen, dalam pidato Presiden Filipina, Rodrigo Duterte pada tanggal 19 Mei 2018, oleh *Bloomberg News*, Presiden Duterte mengutarakan pendapat yaitu Filipina tidak akan menentang segala aktivitas China dalam sengketa wilayah Laut China Selatan. Dalam pidatonya pula disebutkan bahwa Duterte tidak akan melakukan provokasi kepada China setelah sejumlah laporan muncul bahwa pasukan China telah melakukan pendaratan sejumlah pesawat untuk melakukan penyerangan dari jarak jauh di pangkalan militernya di sebuah pulau buatan. China juga memiliki pasukan pengebom yang ditempatkan di provinsi-provinsi China yang menghadap ke salah satu pulau yang menjadi wilayah sengketa, Pulau Spratly dan Laut China Selatan.

(Lopez, 2018). Bilamana pesawat tersebut meluncur, hanya butuh waktu 7 hingga 10 menit dapat sampai ke Ibukota Filipina, yaitu Manila.

Penjelasan mengenai ‘menentang’ dan ‘tunduk’ dalam perubahan kebijakan luar negeri ini telah disiratkan ketika kunjungan luar negeri pertama Presiden Rodrigo Duterte pada 19 Mei 2018 yaitu bahwa Filipina tidak akan melanjutkan kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan sebelumnya yang bersifat konfrontatif terhadap China. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino III, Ia mengejar kebijakan *balancing* terhadap China dengan melakukan kerjasama keamanan yang lebih intens dengan Amerika Serikat yang membuat Filipina berani melakukan penentangan secara terbuka atas klaim yang dilakukan China di Laut China Selatan serta tindakan-tindakan agresif lainnya. Tindakan penentangan lainnya yang dilakukan pada pemerintahan sebelum Presiden Duterte adalah dengan membawa permasalahan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional, yang pada akhirnya tidak akan dilanjutkan oleh Presiden Rodrigo Duterte. Kemudian hal ini mendapatkan titik terang bahwa seakan Presiden Rodrigo Duterte ‘tunduk’ terhadap China karena terdapat kepentingan-kepentingan yang ingin dikejar oleh Duterte dan adanya pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri Filipina.

Pernyataan Presiden Rodrigo Duterte seperti yang dijelaskan diatas merupakan sebuah perubahan yang terlihat signifikan dari segi retorika ataupun kebijakan luar negeri dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Benigno Aquino III (2011 – 2016). Pemerintahan sebelumnya lebih mementingkan kebijakan *balancing* terhadap China dan mendorong kerjasama keamanan yang lebih *intense* dengan Amerika Serikat. Kebijakan *balancing* ini pertama dimulai oleh Presiden Benigno Aquino III yang melakukan penentangan secara terbuka atas *claim* China di Laut China Selatan serta segala tindakan agresif China di Laut China Selatan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Beatrice (2017), memiliki garis besar dengan menekankan sudut pandang melalui *political*

*personality* Presiden Rodrigo Duterte. Pengaruh karakter pemimpin negara dapat menentukan gaya kepemimpinannya dan kebijakan yang diambilnya, terkhusus kebijakan politik luar negeri Filipina. Beatrice juga mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Filipina terhadap China dalam konflik Laut China Selatan merupakan salah satu bentuk kebijakan luar negeri Duterte yang lebih memilih menyelesaikan konflik melalui jalur negosiasi bilateral dibandingkan penyelesaian konflik melalui badan arbitrase internasional. Sejalan dengan Beasley (2013), kebijakan politik luar negeri suatu negara yang mencerminkan pandangan dan kepribadian dari orang yang berkuasa di dalam negara tersebut. (Dwiyantoro, 2017), menekankan pembahasan yang sama, tetapi hanya berfokus kepada dua (2) faktor, yaitu ideologis dan geopolitis. Berdasarkan kajian literatur di atas, penulis bahwa terdapat faktor internal dan eksternal dan kesamaan dengan konsep realpolitik yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Filipina terhadap China di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte dalam konflik Laut China Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Filipina mengalami perubahan kebijakan luar negeri nya terhadap konflik Laut China Selatan dapat dilihat dari segi internal dan eksternal dan juga dalam sudut pandang menggunakan konsep *realpolitik*. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menjelaskan bahwa disamping *political personality*, faktor geopolitis dan ideologis, terdapat faktor internal dan eksternal dan kesamaan dengan kosnep realpolitik yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Filipina terhadap China dalam konflik Laut China Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini menitikberatkan sebuah pertanyaan kunci: “*Mengapa kebijakan luar negeri Filipina mengalami perubahan di masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte?*”

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan kebijakan politik luar negeri Filipina dibawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte terhadap China terkait konflik Laut China Selatan.
2. Untuk menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara mengalami perubahan didorong oleh bermacam-macam faktor yang dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal.
3. Untuk mencari dan menjelaskan faktor-faktor pendorong baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Filipina pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte.

### 1.4 Kerangka Pemikiran

#### 1.4.1 Konsep Realisme Politik (Realpolitik)

Melihat analisis perubahan kebijakan Filipina terhadap konflik Laut China Selatan dapat dilihat melalui perspektif realisme politik. Menurut Morgenthau, politik adalah perjuangan untuk mencapai kekuasaan atas manusia, dan apapun tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya dan cara-cara memperoleh, memelihara, dan menunjukkan kekuasaan menentukan teknik tindakan politik (Morgenthau, 1965, p. 195). Menurut Morgenthau, *realpolitik* memunculkan tiga (3) tujuan mendasar dalam kebijakan luar negeri, yaitu untuk mempertahankan, memperluas, dan menunjukkan *power*.

Dalam sebuah dunia dimana hanya *power* yang berarti, satu-satunya kekangan terhadap sebuah aksi negara adalah kebijaksanaan, yang merupakan pemahaman rasional akan batasan-batasan dari *power*. Dalam pemikiran realis, manusia dicirikan sebagai makhluk yang selalu cemas akan keselamatan dirinya dalam hubungan persaingannya dengan yang lain. Hubungan internasional dipahami oleh kaum realis terutama sebagai perjuangan di antara negara-negara berkekuatan besar untuk dominasi dan keamanan. China, dalam hal ini, diargumentasikan sebagai negara yang

memiliki kekuatan besar dan seakan tidak ingin wilayahnya diperebutkan oleh negara lain.

Yang mendasari pemahaman penulisan ini juga adalah pemikiran dari Thucydides. Dalam studi yang dilakukan oleh Thucydides yang membahas tentang Perang Peloponnesian (431-404 SM), Ia memasukan filsafat realisnya kepada para pemimpin Athena (suatu negara berkekuatan besar) dalam dialognya dengan para pemimpin Melos (suatu negara dengan kekuatan kecil) selama masa konflik antar dua negara kota pada 416 SM (Thucydides, 1972, p. 47).

Konsep *realpolitik* (realisme politik) telah ada sejak tahun 431 – 404 SM ketika terjadi perang Peloponnesian di Yunani. Thucydides, yang merupakan seorang jenderal Sparta (pasukan tentara Yunani pada jaman SM) dan sejarawan menganalogikan interaksi antara polis (negara – kota) Athena dan Melos. Dalam bukunya yang berjudul *The History of the Peloponnesian War*, Thucydides menuangkan segala pemikirannya. Melos adalah sebuah negara-kota yang kecil dan cenderung lemah dibandingkan dengan Athena. Melos berposisi sebagai pihak yang netral, tidak memilih untuk mendukung Sparta atau Athena. Karena Athena takut merasa Melos akan bergabung dengan blok Sparta, akhirnya Athena mengambil tindakan tegas dan memberi ultimatum kepada Melos agar menyerah kepada Athena. Melos akan kehilangan kemerdekaan bilamana menyerahkan diri kepada Athena dan akhirnya Melos tetap mempertahankan polisnya. Para pemimpin Melos memilih untuk melawan, namun pada akhirnya kalah.

Atas dasar perang antara Athena dan Melos ini yang menjadi dasar konsep realisme politik ini. Dalam hubungan internasional, *realpolitik* ini dapat diartikan sebagai interaksi antara dua atau lebih aktor dengan perbandingan kekuatan yang bersifat asimetris (tidak setara dengan yang lainnya). Pihak yang cenderung kuat dapat bertindak apapun sesuai keinginan mereka. Pihak yang cenderung lemah akan menderita konsekuensi atas pihak yang cenderung kuat.

Terdapat sebuah kemiripan antara China dengan Filipina seperti dengan Athena dan Melos pada masa lalu. Disini dapat diposisikan bahwa China sebagai Athena dan Filipina sebagai Melos. Filipina ketika diperhadapkan dengan besar dan kuatnya ekonomi ataupun militer dari China hanya diperhadapkan dengan dua (2) pilihan, yaitu untuk menentang atau patuh. China dalam hal ini memiliki *power* yang lebih besar ketimbang Filipina. Konsep *realpolitik* berpikiran bahwa negara yang relatif lemah agar bertindak secara *prudent* dan tunduk pada tuntutan. Tetapi, mempertahankan *prestige* dan harga diri di dunia internasional merupakan hal yang penting bagi negara-negara yang bersengketa, termasuk Filipina. Konsep *realpolitik* ini juga menuntut mereka yang relatif lemah untuk tunduk secara diplomatis bila terdapat intervensi dari pihak luar.

Laut China Selatan (LCS) telah menjadi konflik yang berkepanjangan sejak perebutan akan wilayah ini oleh negara-negara yang berada di sekitarnya yang saling mengklaim akan Laut China Selatan. Salah satu negara yang berkonflik dan berusaha memperebutkan wilayahnya adalah Filipina. Dengan membeli alat khusus sistem pertahanan dari Amerika Serikat (AS) dan mendapat jaminan keamanan penuh dari Amerika Serikat berdasarkan *Mutual Defense Treaty* (MDT) tahun 1951, mendapatkan hasil yang baik yang pada intinya Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan strategis bagi Filipina.

Dengan kemampuan China yang nampak sangat kuat dan menakutkan dan juga menanggapi kritik akan dirinya yang dianggap lamban sekali dalam menghadapi aktivitas militer China yang semakin meningkat dalam Laut China Selatan, Presiden Duterte tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah tidak ada jaminan lagi bagi Filipina ketika nantinya terjadi pecah perang, Amerika Serikat (AS) akan berada di pihaknya.

Dalam konsepsi realisme, instrumen kebijakan utama yang mempengaruhi analisis kebijakan luar negeri suatu negara adalah kekuatan militer dan kekuatan ekonomi dan negara saling bersaing demi kekuasaan

dan keamanan (Walt, 1998). Penulis juga akan sedikit menyinggung tentang penggunaan realisme ofensif. Karakter sistem internasional yang anarki memaksa negara memperbesar *power*, karena hanya dengan jalan itu, sebuah negara dapat bertahan. Menurut Mearsheimer, secara prinsip terdapat 3 (tiga) pola utama perilaku negara, yaitu *fear*, *self-help* dan *power maximation* (Mearsheimer J. J., 2001). Pola *fear* dan *self-help* inilah yang juga menjadi dasar penelitian ini. Teori ini juga menunjukkan bahwa tujuan negara bukan ingin mempertahankan status quo, melainkan ingin menjadi yang terkuat dalam sistem internasional (Rosyidin, 2018, p. 243). Mearsheimer mengatakan bahwa, “*A state’s ultimate goal is to be the hegemon in the system*” atau dengan kata lain bahwa tujuan semua negara adalah mengejar keamanan nasional (Mearsheimer J. , 2011, p. 21).

Menurut Morgenthau, “*International politics, like all politics, is a struggle for power. Whatever the ultimate aims of international politics, power is always the immediate aim*” (Morgenthau, 1965, p. 190). *Realpolitik* menunjukkan bahwa tujuan kebijakan luar negeri adalah *expand power*, *maintain power*, dan *demonstrate power*. China juga telah melakukan sebuah bentuk realisme ofensif. Realisme ofensif melihat dalam kondisi anarki dan ketidakpastian satu-satunya jalan keluar adalah menjadi hegemon (Rosyidin, 2018, p. 243). Dan saat ini, China telah menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang hegemon.

#### **1.4.2 Faktor Internal dan Eksternal**

Perubahan kebijakan luar negeri suatu negara disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Colplin & Marbun, 2003). Faktor internal atau domestik tersebut bermacam-macam, mulai dari segi sosial, ekonomi, kekuatan militer, pengaruh ideologi, keadaan politik dan juga bagaimana kelompok kepentingan yang ada di Filipina saling memberikan pengaruhnya masing-masing dalam setiap perumusan kebijakan luar negeri Filipina. Faktor eksternal yang juga menjadi pertimbangan pula dalam pengambilan sebuah perumusan kebijakan luar negeri seperti bagaimana pandangan negara lain mengenai Filipina dan juga

bagaimana situasi dan kondisi negara-negara lain dan juga pengaruh perjanjian internasional dalam proses perubahan kebijakan Filipina.

Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr. dalam bukunya yang berjudul *Understanding Foreign Policy Decision Making*, menjelaskan serta mendefinisikan proses pembuatan kebijakan luar negeri ini sebagai pilihan yang diambil oleh individu, koalisi, dan grup yang memengaruhi perilaku sebuah negara di dalam kancah perpolitikan internasional (Alex Mints, Karl Derouen, 2010). Terdapat empat (4) faktor yang memengaruhi sebuah negara di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, diantaranya *Psychological Factors*, *Environmental Factors*, *Domestic Factors*, dan *International Factors* (Alex Mints, Karl Derouen, 2010). Pada penelitian ini, fokus utama yang digunakan hanya berfokus pada *Domestic Factors* sebagai faktor internal dan *International Factors* sebagai faktor eksternal pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara.

Faktor domestik atau internal mempengaruhi proses sebuah negara dalam membuat kebijakan luar negerinya. Yang termasuk dalam faktor ini berupa politik dalam negeri, kondisi politik, opini publik dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Terdapat lima (5) faktor yang termasuk di dalam faktor internal ini, yaitu:

1. *Economic Conditions (diversionary tactics)*

Kondisi ekonomi suatu negara yang mengalami keadaan dalam kondisi defisit/lemah berarti bahwa kebijakan luar negeri yang dibentuk oleh suatu kepemimpinan adalah sebagai pengalih perhatian rakyat terhadap kondisi ekonomi tersebut. Maka dari itu, kondisi ekonomi suatu negara yang kurang berkembang dapat dikatakan agresif terhadap kebijakan luar negerinya.



2. *Economic Interests*

Proses pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh motif kepentingan ekonomi dari negara tersebut.

3. Opini Publik (*public opinion*)

Kebijakan luar negeri yang dibentuk tiap masa pemerintahan di Filipina bila tidak mendapat dukungan dari warga negaranya, maka tekanan akan datang dari dalam negeri tersebut dan mengakibatkan efektifitas rezim tersebut menjadi melemah. Hal ini dapat membuat proses pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara memberi perhatian yang khusus terhadap opini publik.

4. *Electoral cycles*

Syarat bahwa sebuah negara dikatakan sebagai negara yang demokratis adalah melakukan pemilihan umum, dan pada umumnya rezim cenderung membentuk kebijakan yang membuat rakyatnya menjadi senang dengan kebijakan tersebut. Filipina merupakan negara yang demokratis, maka dari itu, rezim yang terbentuk di Filipina membuat pembentukan kebijakan luar negeri Filipina harus menyenangkan rakyatnya dan setiap periode kepemimpinan di Filipina mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negerinya.

5. *Two-level Games*

Konsep ini dikembangkan oleh Robert Putnam pada tahun 1999. Dasar dari konsep ini yaitu bahwa suatu proses atau langkah internasional sebuah negara mempertimbangkan segala hal yang terkait dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam negaranya (Alex Mintz, Karl Derouen, 2010).

Seluruh faktor internal yang mempengaruhi proses sebuah negara dalam membuat kebijakan luar negerinya ini hadir dalam perubahan kebijakan luar negeri Filipina terhadap China dalam konflik Laut China Selatan. Pada penelitian ini, fokus utama yang digunakan dari faktor internal

ini hanya akan membahas *economic interests* yang berarti dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh motif kepentingan nasional (didalamnya termasuk kepentingan ekonomi) negara tersebut, opini publik yang mana tekanan dalam hal ini datang dari kelompok kepentingan / *civil society* dan *electoral cycles* yang didefinisikan bahwa Filipina merupakan negara yang demokratis, rezim yang terbentuk di Filipina membuat pembentukan kebijakan luar negeri Filipina harus menyenangkan rakyatnya dan setiap periode kepemimpinan di Filipina mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negerinya. Berdasarkan hal tersebut, adanya kepentingan dalam perlindungan keamanan dan kesatuan wilayah, peran pemerintah (dalam hal ini Rodrigo Duterte sebagai presiden), serta adanya kepentingan nasional Filipina termasuk juga di dalam faktor internal yang dibahas dalam penelitian ini.

Faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dalam suatu sistem internasional juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr. dalam bukunya yang berjudul *Understanding Foreign Policy Decision Making*, menjelaskan tentang faktor eksternal ini (Alex Mints, Karl Derouen, 2010). Dalam bukunya, Alex Mintz menjelaskan bahwa faktor eksternal/faktor internasional ini adalah faktor yang datang dari luar negara pembuat kebijakan internasional yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan internasional di negeri tersebut dan membagi kedalam lima (5) karakteristik, yaitu:

1. *Deterrence* / Deterensi

Deterensi merupakan sebuah strategi militer yang digunakan pada masa perang dingin yang terkait dengan penggunaan senjata nuklir (Freedman, 2004). Konsep ini merupakan konsep yang digunakan oleh negara-negara pada kancah perpolitikan internasional untuk menekan 'rival' nya atau dalam kata lain memberikan sebuah gertakan pada negara lain. Deterensi pada umumnya sangat efektif untuk menekan kondisi psikologis para

pembuat kebijakan dari negara yang ditekan sehingga terkadang kebijakan luar negerinya mengambil langkah deterensi kembali. Keadaan seperti ini pada akhirnya akan kembali dengan sebuah bentuk baru yang disebut *arms races* (Alex Mints, Karl Derouen, 2010).

## 2. *Arms races* / Perlombaan Senjata

Perlombaan senjata merupakan konsep *balance of power* (penyeimbangan kekuasaan) yang dilakukan oleh dua (2) negara atau lebih agar masing-masing dari kedua negara tersebut merasakan keadaan yang aman dikarenakan memiliki kapabilitas militer yang tinggi. Dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang diambil pada masa-masa krisis (seperti perang, dsb.), perlombaan senjata atau *arms races* ini akan semakin memiliki peran yang besar (Alex Mints, Karl Derouen, 2010)

## 3. *Alliances* / Aliansi

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara yang dapat dikategorikan dari lingkungan eksternal suatu negara. Aliansi seperti SEATO dan NATO pada masa lalu sangat berperan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri pada negara anggotanya. Negara-negara anggota didalamnya harus mentaati segala kebijakan yang telah diatur, walaupun terdapat beberapa negara anggota lain yang menolak, intervensi tetap harus dijalankan.

## 4. *Regime type of the adversary*

Faktor ini berpengaruh ketika masa-masa krisis suatu negara. Negara yang memiliki paham yang demokratis tidak akan mengambil jalan perang dengan negara demokrasi yang lain. Hal ini dikarenakan terdapat sesuatu yang melekat di dalam demokrasi untuk membawa sengketa ke dalam penyelesaian secara damai (*bilateral solution*) daripada kontak fisik/senjata secara langsung. Hal ini dapat diartikan bahwa adanya

perbedaan dan rezim juga memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara.

#### 5. *Strategic surprise*

*Strategic surprise* didefinisikan oleh John Lewis Gaddis sebagai pemaksaan pemakaian sebuah jalan yang tidak diduga pada waktu yang tidak diduga guna melawan target yang tidak diduga, dengan mengupayakan untuk meningkatkan metode perang yang konvensional (Gaddis, 2002).

Faktor eksternal yang dikemukakan oleh Alex Mintz yang ada dalam penelitian ini berfokus pada *deterrence* dan *regime type of the adversary*. *Deterrence* atau Deterensi yang digunakan dalam penelitian ini tidak menekankan pada penggunaan senjata nuklir seperti pada masa lampau, tetapi bahwa China memberikan tekanan kepada Filipina seperti yang telah dilakukan oleh China dengan menempatkan sejumlah pesawat pengebom jarak jauh pada pangkalan militer China di sebuah pulau buatan di Laut China Selatan. Deterensi pada umumnya sangat efektif untuk menekan kondisi psikologis para pembuat kebijakan dari negara yang ditekan sehingga terkadang kebijakan luar negerinya mengambil langkah-langkah untuk menghindari hal tersebut. *Regime type of the adversary* yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa Filipina, sebagai yang memiliki paham yang demokratis tidak akan mengambil jalan perang dengan negara demokrasi yang lain, dalam hal ini adalah China. Hal ini dapat dibuktikan dengan kunjungan pertama langsung yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte ke China untuk salah satunya adalah menyatakan pendapat bahwa Filipina tidak akan menentang China dalam segala hal, termasuk tidak akan melanjutkan perlawanan dalam konflik Laut China Selatan seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan sebelum Presiden Rodrigo Duterte, yaitu Presiden Benigno Aquino III.

## **1.5 Argumen Utama**

Konsep permasalahan ini dapat dianalisis dengan menggunakan konsep internal dan eksternal dan konsep *realpolitik*. Problematika ini dapat dianalogikan seperti yang dikatakan oleh Thucydides yaitu antara Athena dan Melos. Dalam pidato Presiden Duterte, Ia menyiratkan bahwa Filipina tidak akan menentang China. Nilai ekonomi dan bentuk strategis ini dimiliki Laut China Selatan. Hal tersebut yang membuat negara-negara sekitar Laut China Selatan menjadi “rebutan” dan salah satunya adalah Filipina. Perubahan retorika dan kebijakan dari presiden sebelumnya yang dilakukan oleh Duterte ini dapat dijabarkan melalui konsep realisme politik. Amerika Serikat tidak lagi dapat menjadi penyeimbang kekuatan dari China dan tidak lagi menjadi andalan sehingga menuntut Duterte untuk melakukan penghitungan ulang atas pilihan yang telah dibuat sebelumnya. Risiko dalam menentang China jauh lebih besar daripada mendapatkan untung (*risk-benefit*) dan hal ini yang membuat Filipina menjadi “tunduk” kepada China dalam konflik Laut China Selatan ini dan konsep *realpolitik* mencoba menjelaskan permasalahan ini.

## **1.6 Hipotesis**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, menimbulkan sebuah pertanyaan baru yang kemudian akan berusaha dijawab di dalam penulisan ini. Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan luar negeri pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte terhadap China dalam konflik Laut China Selatan dipengaruhi adanya faktor internal dan eksternal yang berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan serta memiliki kesamaan dengan konsep *realpolitik*.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penulis menggunakan metode eksplanatif kualitatif di dalam penelitian ini. Pada penelitian eksplanatif, metode yang digunakan adalah untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Menurut Whitney (1960: 160), metode eksplanatif adalah pencarian fakta dengan menggunakan interpretasi

yang tepat. Metode eksplanatif juga menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki bersamaan dengan interpretasi yang seimbang. Metode eksplanatif yang digunakan kali ini memiliki tujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang memuat tentang kebijakan politik luar negeri Filipina terhadap China, khususnya yang terjadi dalam konflik Laut China Selatan.

Penulis juga akan menggunakan teknik analisis metode kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan adalah mencari pemahaman secara mendalam dan menganalisis latar belakang dan bentuk dari kebijakan politik luar negeri Filipina terhadap China dalam konflik Laut China Selatan.

## **1.7.2 Teknik Pengumpulan Data**

### **1.7.2.1 Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer yang penulis gunakan kali ini adalah menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara mendalam. Menurut Sutopo (2006:72), wawancara mendalam atau *in-depth interview* merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Pada penulisan dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada Prof. David Nadnaden Almaraz, dosen di Mindanao State University yang memiliki fokus penelitian dalam *conflict management*, *policy studies*, dan *political leadership*. Beliau juga merupakan Ketua *Philippine Political Science Association (PPSA)*.

### **1.7.2.2 Data Sekunder**

Teknik pengumpulan data sekunder yang penulis gunakan adalah menggunakan metode studi dokumen atau *library research*. Menurut Sugiyono (2006: 83) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa keuntungan dari penggunaan studi dokumen dalam penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan Nasution (2003: 85). Penggunaan metode ini memiliki sumber dari berbagai literatur, seperti jurnal-jurnal, artikel-artikel, internet, dan buku-buku yang relevan dalam menganalisis permasalahan didalam penelitian ini.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan yang merupakan rancangan besar dari penelitian ini. Di dalam bab 1 akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, argumen utama, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan penelitian ini sendiri.

Bab II adalah Kebijakan Politik Luar Negeri Filipina dan Laut China Selatan. Di dalam Bab II ini akan dibahas lebih lanjut mengenai “nine-dash line” dan pemahaman tentang dasar serta tujuan kebijakan politik luar negeri Filipina dan juga akan membahas tentang potensi serta nilai strategis Laut China Selatan.

Bab III adalah Analisis Kebijakan dan Perubahan Kebijakan Filipina Pada Pemerintahan Rodrigo Duterte Dalam Konflik Laut China Selatan. Dalam Bab III ini akan menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Filipina di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte dan kaitannya dengan konsep realpolitik. Di dalamnya juga termasuk menganalisis adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi segala perubahan kebijakan Filipina terhadap Laut China Selatan.

Bab IV adalah Penutup. Pada bagian penutup ini, penulis akan memberikan kesimpulan secara singkat dan saran mengenai tindakan yang sekiranya dapat efektif untuk dilakukan dalam mengatasi konflik ini.